

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Burma sejak awal berbentuk dengan sistem kerajaan mandala seperti halnya bentuk politik Asia Tenggara jaman dahulu yang tidak hanya bertumpu pada batas teritorial. Akan tetapi, pada pusat kekuasaan yang berasal dari istana raja, dimana wilayah yang semakin jauh dari pusat istana raja maka akan semakin pudar juga kekuasaan suatu kerajaan yang dominan. Pada masa pra-kolonial saat itu, Burma dikuasai oleh tiga dinasti besar, yakni dinasti Pagan yang bertahan dari 849-1267 SM, dinasti Toungoo dari 1486-1752 SM, dan dinasti Konbaung dari 1752-1885 SM, dengan ibukota yang berpindah-pindah sesuai dinamika politik dan dinasti, pada saat itu raja dianggap sebagai Dhammaraja yakni penguasa yang sah secara moral karena menjalankan nilai-nilai buddhisme theravada<sup>1</sup>

Kemudian Pada awal 1940-an, Burma di bawah kendali Kerajaan Inggris pada 1886. Namun, dinamika politik di negeri ini berubah drastis selama Perang Dunia II, Burma menjadi wilayah kekuasaan Jepang yang dimulai pada bulan Januari 1942 dan mengusir administrasi kolonial Inggris.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Michael Aung Thwin. (1985). *Pagan: The Origins of Modern Burma*. University of Hawai'i Press, hal. 22-23

<sup>2</sup> Robert H. Taylor. (2009). *The State in Myanmar*. NUS Press. Hal. 224

Kudeta militer di Myanmar pertama kali dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada tanggal 2 Maret 1962<sup>3</sup>. Hal itulah yang menjadi awal mula pemerintahan militer terlaksana. Kudeta militer itu terjadi disaat pemerintahan militer Dewan Revolusi Persatuan yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win berhasil menggantikan pemerintahan sipil The Anti-Fascist People's Freedom League (AFPFL) yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu . Kemunculan kekuatan militer dalam sistem pemerintahan dan politik Myanmar telah menggantikan pelaksanaan sistem demokrasi parlementer yang telah diterapkan di Myanmar sebelum dan sesudah kemerdekaannya dari Inggris.

Peralihan kekuasaan secara kudeta militer bagi Myanmar tidak pertama kali terjadi, akan tetapi telah terjadi beberapa kali mulai dari tahun 1962, 1988<sup>4</sup>, hingga 2021. Masa kepemimpinan militer dibagi menjadi dua periode, Periode pertama terjadi pada tahun 1962-1974 dan periode kedua terjadi pada 1974-1988. Kudeta militer periode kedua terjadi pada tahun 1988 dibawah pemerintahan Saw Muang, Myanmar mengalami kudeta militer yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Kudeta militer yang terjadi di Myanmar ini bukan tanpa alasan, salah satu penyebab terbesar terjadinya kudeta militer karena adanya penolakan dari hasil pemilihan umum oleh militer yang diduga terdapat kecurangan di dalamnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Rizbar Bara Ryamizard, *Kudeta Militer Myanmar*, diakses dalam <https://www.ircorner.com/kudeta-militer-myanmar/> (09/03/2025, 09.43 WIB)

<sup>4</sup>Konsam Shakila Devi, *Myanmar under the military rule 1962-1988*. International Research Journal of Social Sciences Vol, 3, No, 10, (2014), hal. 46.

<sup>5</sup>Alauddin, *Kudeta Myanmar dan Stabilitas Kawasan ASEAN*. CNBC Indonesia, diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20210409042332-14-236409/kudeta-myanmar-dan-stabilitas-kawasan-asean> (09/03/2025, 09.45 WIB)

Kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan menahan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, kudeta ini mengakhiri periode singkat transisi demokrasi yang dimulai pada 2011, membawa negara kembali ke rezim otoriter militer yang kemudian menimbulkan perubahan kehidupan demokrasi di Myanmar pasca terjadinya kudeta militer. Sejak terjadinya kudeta militer di Myanmar, kemajuan yang dibangun menuju negara demokrasi di Myanmar selama beberapa tahun terakhir kemudian berubah yang akhirnya mempengaruhi indeks demokrasi Myanmar. Myanmar sebelumnya telah berada di bawah kepemimpinan militer selama kurang lebih lima dekade, dan akibat dari kudeta militer yang terjadi pada tahun 2021 silam menyebabkan Myanmar mengalami penurunan dalam perekonomian, banyak korban jiwa yang ditimbulkan, dan masih banyak lagi.<sup>6</sup>

Pasca kudeta, Myanmar mengalami gejolak politik dan sosial yang signifikan. Protes massal yang dikenal sebagai Gerakan Pembangkangan Sipil muncul di berbagai kota besar, menuntut pemulihan demokrasi dan pembebasan para pemimpin yang ditahan. Namun, respons militer terhadap demonstrasi ini sangat represif, dengan penggunaan kekuatan mematikan yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan penahanan massal terhadap aktivis pro-demokrasi. Di tengah penindasan tersebut, kelompok oposisi membentuk Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) sebagai pemerintahan bayangan yang menentang legitimasi junta militer. NUG terdiri dari anggota parlemen yang terpilih

---

<sup>6</sup> Arbar. T, *Efek Kudeta Junta Militer, Mata Uang Myanmar Anjlok 60% Lebih*. CNBC Indonesia, diakses dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211011180825-17-283076/efek-kudeta-junta-militer-mata-uang-myanmar-anjlok-60-lebih> (09/03/2025, 09.50 WIB)

pada pemilu 2020, perwakilan etnis minoritas, dan aktivis pro-demokrasi. Selain itu, NUG membentuk Pasukan Pertahanan Rakyat (People's Defense Force/PDF) sebagai sayap militer untuk melawan junta. Konflik bersenjata antara PDF dan militer pun tak terhindarkan, memicu perang saudara yang berkepanjangan.<sup>7</sup>

Komunitas internasional merespons situasi di Myanmar dengan berbagai sanksi dan tekanan diplomatik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi yang menyerukan embargo senjata terhadap Myanmar, meskipun implementasinya terbatas karena veto dari negara-negara seperti Rusia dan China. Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi terhadap para pemimpin militer dan entitas yang terkait dengan junta. Namun, dukungan dari negara-negara seperti Rusia dan China memberikan jalur bagi junta untuk menghindari isolasi total.<sup>8</sup>

Rusia, misalnya, telah mempererat hubungan dengan junta Myanmar, menyediakan peralatan militer, pelatihan bagi pilot Angkatan Udara Myanmar, dan dukungan diplomatik. Pada Maret 2025, pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing, melakukan kunjungan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pada sisi lain, tekanan domestik terhadap junta tetap tinggi, gerakan perlawanan sipil terus berlanjut meskipun menghadapi represi brutal. Pada April 2024, aliansi anti-junta melancarkan serangan drone signifikan terhadap target militer di ibu kota Naypyitaw, menandai eskalasi dalam taktik perlawanan.

---

<sup>7</sup> Nurulhaq, D. R., 2024, *UPAYA CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT DALAM DEMOKRATISASI DI MYANMAR PASCA KUDETA TAHUN 2021-2022*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhamadiyah Malang, hal. 15.

<sup>8</sup> Sandhika, H., 2023, *Peran ASEAN dan PBB dalam Mendorong Proses Demokratisasi di Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021*, *Journal on Education*, 5(4), hal 6.

Serangan ini menyebabkan korban di pihak militer dan menunjukkan kemampuan yang meningkat dari kelompok perlawanan.<sup>9</sup>

Kudeta militer di Myanmar menandai kembalinya kekuasaan otoriter setelah periode transisi menuju demokrasi yang relatif singkat. Dalam situasi ini, penting untuk menganalisis bagaimana junta militer menggunakan berbagai taktik untuk mempertahankan kekuasaan mereka, termasuk tindakan represif terhadap oposisi, pengendalian media, dan manipulasi narasi publik. Dengan menggunakan kerangka konseptual authoritarian resilience, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme yang memungkinkan junta untuk tetap berkuasa meskipun ada penolakan yang meluas dari masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana rezim otoriter dapat mempertahankan kekuasaan di tengah tuntutan untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks Myanmar, Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mengalami siklus panjang kekuasaan militer sejak awal kemerdekaan pada 1948, menjadikannya kasus khas di mana institusi militer (*Tatmadaw*) bukan sekadar aktor keamanan, tetapi juga aktor politik dominan yang membentuk struktur negara. Kembali berkuasanya militer melalui kudeta 1 Februari 2021 memperlihatkan bahwa rezim ini bukanlah fenomena tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari pola historis yang berakar kuat. Karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pola-pola kekuasaan sebelum 2021 seperti rezim Ne Win, SLORC, dan SPDC terus diwariskan dan diadaptasi oleh State

---

<sup>9</sup> Khumar, *Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer Di Myanmar*; TEMPO, diakses dalam <https://www.tempo.co/internasional/menilik-jejak-sejarah-kudeta-junta-militer-di-myanmar-67214> (10/03/2025, 17.10 WIB)

Administration Council (SAC) saat ini sebagai bentuk kesinambungan otoritarianisme di Myanmar, Tidak seperti rezim junta sebelumnya, junta Aung Hlaing menghadapi masyarakat yang terhubung melalui internet dan media sosial. Karena itu, blokir internet, pembatasan aplikasi, sensor digital, penutupan jaringan seluler, serta kriminalisasi konten daring menjadi instrumen penting dalam arsitektur ketahanan rezim. Dinamika ini membutuhkan analisis akademik baru karena menggabungkan bentuk-bentuk otoritarianisme lama dengan teknologi pengawasan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai strategi yang digunakan oleh junta militer, termasuk represi, kooptasi, dan kontrol informasi, serta bagaimana strategi-strategi ini berkontribusi pada ketahanan rezim. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana rezim otoriter, meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, mampu bertahan dan beradaptasi dengan menggunakan berbagai taktik yang telah terbukti efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk konteks Myanmar, tetapi juga untuk studi-studi lebih luas mengenai ketahanan rezim otoriter di seluruh dunia. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari ketahanan rezim junta militer terhadap masyarakat Myanmar, serta peran aktor internasional dalam konteks ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang yang digunakan sebagai gambaran dari isu yang akan diangkat, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana rezim otoriter junta militer bertahan pasca kudeta tahun 2021?.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini tentu saja memiliki sejumlah tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Membuka wawasan dan memberikan pengetahuan terhadap bagaimana kudeta militer yang terjadi di Myanmar pasca kudeta militer 2021.
2. Memberikan pengetahuan dan wawasan pengetahuan terkait bagaimana rezim otoriter dapat bertahan selama ini pasca kudeta.
3. Membuka wawasan dan memberikan pengetahuan terkait kudeta militer di Myanmar yang telah terjadi pada beberapa dekade.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

#### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

Penulis berharap secara akademis penelitian ini dapat memberi pengetahuan dan wawasan baru pada semua pembaca, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi penelitian baru selanjutnya. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

sumber referensi dan sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional terlebih yang berhubungan dengan kudeta militer dan bertahannya rezim militer berkuasa di Myanmar.

### 1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi penulis serta pembaca yang ingin mengetahui dan memahami isu-isu terkait kudeta militer yang terjadi, berkuasanya partai militer di pemerintahan Myanmar dan bagaimana rezim junta mempertahankan kekuasaan dari awal pasca kudeta militer tahun 2021 oleh militer meskipun mengalami berbagai tekanan baik dari internal ataupun dunia internasional.

### 1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa acuan dalam menulis, yaitu menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menulis penelitian. Penelitian pertama yang menjadi acuan dalam penulisan ini adalah penelitian berjudul "*Peran ASEAN dan PBB dalam Mendorong Proses Demokratisasi di Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021*", penelitian ini disusun oleh Hagi Mulyana Sandika.<sup>10</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana resolusi, upaya, dan deklarasi ASEAN dan PBB dalam membantu dan mendorong Myanmar melanjutkan proses demokratisasi pasca terjadinya kudeta militer.

---

<sup>10</sup> Sandhika, H. (2023). Peran ASEAN dan PBB dalam Mendorong Proses Demokratisasi di Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021. *Journal on Education*, 5(4), 15681-15688. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2679>

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian saya adalah, kedua penelitian membahas bagaimana kondisi demokrasi Myanmar setelah terjadinya kudeta militer 2021. Adapun perbedaan yang terdapat antara kedua penelitian yakni, pada penelitian yang disusun oleh sandika, memiliki fokus kepada bagaimana peran ASEAN dan PBB dalam mendorong demokratisasi di Myanmar, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan lebih memfokuskan kepada dinamika pasca kudeta militer tanpa memfokuskan kepada peran organisasi internasional saja.

Penelitian kedua yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian berjudul “*Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar*” yang disusun oleh Risalatu Mirajah.<sup>11</sup> Penelitian ini kemudian menjadi acuan dalam menuliskan bagaimana dinamika demokrasi di Myanmar. Saya menggunakan penelitian ini karena Myanmar telah mengalami transisi demokratisasi beberapa kali, sehingga penelitian ini dianggap relevan untuk mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya demokratisasi di Myanmar. Persamaan yang terdapat antara penelitian ini dan penelitian yang saya teliti adalah, keduanya membahas bagaimana kemudian Myanmar memiliki sejumlah penyebab terjadinya kudeta militer sehingga demokratisasi yang dibangun beberapa tahun belakang menjadi kembali berbalik ke arah yang tidak demokrasi. Yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian ini adalah rentang waktu yang digunakan, apabila dalam penelitian yang disusun oleh

---

<sup>11</sup> Mirajah, R. (2014). Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(2). <https://doi.org/10.26593/jihi.v9i2.1048.%p>

Mirajah berlatar belakang pada tahun 2012, penelitian yang saya tulis memiliki batasan waktu pada tahun 2021 hingga 2023.

Penelitian ketiga yang menjadi acuan dalam melakukan penulisan penelitian ini adalah “***Dinamika Kehidupan Demokrasi di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer di Tahun 2021)***” yang disusun oleh Fernando Eugenio Rugian, Burhan Niode Niode, dan Trilke Erita Tulung.<sup>12</sup> Pada penelitian ini memiliki persamaan berupa pembahasan yang membahas tentang bagaimana dinamika kehidupan demokrasi di Myanmar pasca terjadinya kudeta militer 2021. Pada penelitian ini juga lebih menjelaskan bagaimana Myanmar kemudian belum mampu untuk melaksanakan demokrasi dikarenakan masih terjadinya tidak ada rasa kepercayaan antara masyarakat sipil dan militer. Adapun perbedaan yang terdapat pada kedua penelitian adalah, pada penelitian yang disusun oleh Rugian et al., pembahasannya seputar dengan kudeta yang terjadi dan fungsi militer yang dominan pada masa kudeta militer. Sedangkan pada penelitian yang saya tulis, lebih membahas mengenai dinamika demokrasi di Myanmar, kondisi Myanmar pasca terjadinya kudeta di Myanmar, dan indeks demokrasi di Myanmar tahun 2021 hingga tahun 2023.

Penelitian keempat yang menjadi acuan dalam melakukan penulisan penelitian ini adalah “**Upaya Civil Disobedience Movement Dalam Demokratisasi di Myanmar Pasca Kudeta Tahun 2021-2022**” yang disusun oleh

---

<sup>12</sup> Rugian, F. E., Niode, B. N., & Tulung, T. E. (2022). Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2105>

Nurulhaq Devira pada tahun 2024.<sup>13</sup> Pada penelitian ini memiliki persamaan berupa pembahasan yang berkaitan dengan terjadinya demokratisasi di Myanmar setelah kudeta militer pada tahun 2021. Pada penelitian ini juga lebih membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh Gerakan Sosial Civil Disobedience dalam menggulingkan rezim militer yang berkuasa saat ini, serta menjelaskan bagaimana awal dari lahirnya gerakan Civil Disobedience Movement yang diawali oleh ide pemimpin National League Democratic, Suu Kyi ketika dalam tawanan junta militer sebagai respon masyarakat yang menolak adanya kudeta militer. Adapun yang menjadi pembeda kedua dari kedua penelitian ini adalah perbedaan ialah fokus pembahasan, penelitian yang penulis susun lebih terfokus pada dinamika kehidupan demokrasi yang terjadi pasca kudeta, kemudian berbeda pada landasan konseptual yang dimana penelitian ini menggunakan konsep gerakan sosial baru terfokus pada gerakan CDM, sehingga berbeda pula pada batasan materi.

Penelitian kelima yang menjadi acuan dalam melakukan penulisan penelitian ini adalah “**Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021**” yang disusun oleh Willi Ashadi Pada Tahun 2022<sup>14</sup>. Pada penelitian yang ditulis oleh Willi Ashadi mengenai kudeta militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi pada tahun 2021 mengangkat masalah utama terkait dengan pengambilalihan kekuasaan oleh junta militer setelah pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai National League for Democracy (NLD). Penelitian berfokus pada tuduhan kecurangan yang dilontarkan oleh pihak oposisi dan militer, yang mengakibatkan

---

<sup>13</sup> Nurulhaq, D. R. (2024). UPAYA CIVIL DISOBEDIENCE MOVEMENT DALAM DEMOKRATISASI DI MYANMAR PASCA KUDETA TAHUN 2021-2022 [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>14</sup> Willi A. (2022). *Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021*. 1–27.

penangkapan Aung San Suu Kyi dan pengumuman keadaan darurat di Myanmar. Dalam penelitian ini, Ashadi menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kudeta militer tidak hanya menghancurkan harapan demokrasi yang telah dibangun, tetapi juga memperkuat kontrol militer atas negara, dengan tindakan represif terhadap protes dan penangkapan para pemimpin NLD. Penelitian ini menyoroti bagaimana kekuatan militer dapat mengatasi tantangan dari pemerintahan sipil dan mempertahankan kekuasaan melalui strategi represi dan kontrol informasi.

Penelitian keenam yang menjadi acuan dalam melakukan penulisan penelitian ini adalah **“Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Modern Era”** yang disusun oleh Faustina Isvana S.D.J, Euneke Dewi T, Fiki Rahmatina N pada tahun 2021<sup>15</sup>. Penelitian ini membahas masalah utama terkait dengan dominasi militer dalam politik Myanmar dan tantangan yang dihadapi dalam proses demokratisasi, terutama setelah kudeta militer pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kudeta tersebut menghambat kemajuan demokrasi yang telah dicapai sebelumnya dan memperkuat kekuasaan militer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana penulis mengkaji literatur dan data historis untuk memahami konteks politik Myanmar serta dampak kudeta terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan demokrasi, kekuatan militer tetap dominan dan menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan kontrol, termasuk represi terhadap oposisi dan

---

<sup>15</sup> Faustina, I. S. D. J., Dewi, E., & Rahmatina, F. (2021). *KUDETA MYANMAR : JUNTA MILITER DI ERA MODERN* (Vol. 1, Issue 1).

pengendalian informasi. Penelitian ini menekankan bahwa ketahanan rezim militer di Myanmar mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam transisi menuju demokrasi di negara-negara yang memiliki sejarah otoritarianisme.

Penelitian ketujuh yang menjadi acuan dalam melakukan penulisan penelitian ini adalah **“Peranan Aung San Suu Kyi Dalam Masa Transisi Politik Di Myanmar Periode: 1990- 2000”** yang disusun oleh Farida Choirunnisa pada tahun 2015<sup>16</sup>. Penelitian ini dengan fokus pada perubahan perannya dari aktivis pro-demokrasi menjadi politisi moderat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis terhadap dua periode berbeda dalam karir Aung San Suu Kyi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aung San Suu Kyi memiliki peran penting dalam mendorong demokratisasi di Myanmar, tetapi terhalang oleh konstitusi yang tidak mendukung dan kudeta militer, yang menunjukkan tantangan yang dihadapi individu dalam mempertahankan proses demokrasi di bawah rezim otoriter.

Penelitian kedelapan yang menjadi acuan dalam melakukan penulisan penelitian ini adalah **“Analisis Kudeta Militer Myanmar dari Perspektif Hukum Pidana Internasional”** yang disusun oleh Kadek Putra Yasa pada tahun 2022<sup>17</sup>. Penelitian ini membahas masalah pelanggaran hukum internasional yang terjadi akibat kudeta militer di Myanmar dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum kualitatif, di mana penulis mengkaji tindakan kudeta dan implikasinya terhadap hukum pidana

---

<sup>16</sup> Choirunnisa, Farida. H. (2015). *PERANAN AUNG SAN SUU KYI DALAM MASA TRANSISI POLITIK DI MYANMAR PERIODE 1990-2000*.

<sup>17</sup> Putra Yasa, K. (2022). ANALISIS KUDETA MILITER MYANMAR TERHADAP PEMERINTAHAN SIPIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2).

internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kudeta militer merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional, serta menyoroti kurangnya intervensi yang efektif dari komunitas internasional untuk menangani pelanggaran yang terjadi, yang semakin memperburuk situasi di Myanmar.

Penelitian kesembilan yang menjadi acuan dalam melakukan penulisan penelitian ini adalah **“Hubungan Sipil dan Militer Melalui Dinamika Kudeta Militer di Thailand”** yang disusun oleh Oleh Faustina Ivana S.D.J, Euneke Dewi T, Fiki Rahmatina N pada tahun 2023<sup>18</sup>. Penelitian ini membahas masalah utama terkait hubungan sipil dan militer di Thailand, khususnya dalam konteks kudeta militer yang terjadi di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber sekunder, termasuk jurnal dan berita, yang kemudian divalidasi melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kudeta militer di Thailand, yang telah terjadi sebanyak 11 kali sejak 1932, mencerminkan ketegangan yang terus-menerus antara kekuasaan sipil dan militer, di mana militer sering kali mengambil alih kekuasaan dengan alasan menjaga stabilitas dan keamanan, meskipun hal ini menghambat proses demokratisasi yang telah dicapai.

Penelitian kesepuluh yang menjadi acuan dalam melakukan penulisan penelitian ini adalah **“Rezim Militer dan Otoriter di Mesir, Suriah, dan Libya”** yang disusun oleh Mohammand Riza Widyarsa pada tahun 2012<sup>19</sup>. Penelitian ini

---

<sup>18</sup> Faustina, I. S. D. J., Dewi, E., & Rahmatina, F. (2021). *KUDETA MYANMAR : JUNTA MILITER DI ERA MODERN* (Vol. 1, Issue 1).

<sup>19</sup> Riza Widyarsa, M. (2012). *Rezim Militer dan Otoriter di Mesir, Suriah dan Libya* (Vol. 1, Issue 4).

membahas mengenai rezim militer dan otoriter di Mesir, Suriah, dan Libya, serta bagaimana ketiga rezim ini dapat bertahan selama lebih dari satu dekade. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang mengkaji sejarah dan dinamika politik di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan rezim militer ini didukung oleh penggunaan aparat militer, polisi rahasia, dan jaringan politik yang kuat, serta hubungan dengan negara-negara Barat untuk menghadapi ancaman dari kelompok politik Islam. Penelitian ini menyoroti bagaimana latar belakang militer para pemimpin ini berkontribusi pada stabilitas kekuasaan mereka di tengah arus oposisi yang ada.

Penelitian terdahulu yang dicantumkan di atas akan digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam menuliskan penelitian ini. Selain itu, adanya penelitian terdahulu akan memberikan gambaran umum bagaimana demokratisasi di Myanmar sebelum terjadinya kudeta militer pada tahun 2021 yang lalu dan setelah terjadinya kudeta militer.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Nama Penulis	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	<i>Peran ASEAN dan PBB dalam Mendorong Proses Demokratisasi di Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021</i> Oleh Hagi Mulyana.	Kualitatif Pendekatan: Teori Liberalisme	Pada penelitian yang disusun oleh Hagi Mulyana ini, menemukan bahwa peran ASEAN lebih memberi efek positif untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar,

	Diterbitkan Tahun 2023		melalui inisiatif ASEAN 5-pc.
2	<p>Faktor Internal dan Faktor Eskternal Yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar</p> <p>Oleh Risalatu Mirajah.</p> <p>Diterbitkan Tahun 2013</p>	<p>Pendekatan: Teori Demokratisasi</p>	<p>Pada penelitian ini menghasilkan bahwa junt militer berminat untuk melakukan demokratisasi dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal, berupa masyarakat Myanmar mengalami kemiskinan yang semakin merajalela dan semakin kuatnya kelompok pro demokrasi, adapu faktor eksternal berupa adanya kecaman dari negara-negara pendonor.</p>
3	<p>Dinamika Kehidupan Demokrasi di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer di Tahun 2021)</p> <p>Oleh Fernando Eugenio Rugian, Burhan Niode Niode, dan Trilke Erita Tulung</p> <p>Diterbitkan Tahun 2022</p>	<p>Kualitatif-Deskriptif.</p> <p>Pendekatan: Teori Demokrasi</p>	<p>Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Myanmar belum mampu menerapkan sistem demokrasi yang stabil, terutama karena kurangnya kepercayaan antara sipil dan militer. Sejarah politik Myanmar mencatat bahwa militer telah lama memainkan peran dominan dalam pemerintahan. Pemilihan umum telah diadakan beberapa kali namun hasilnya tidak diakui oleh militer.</p>
4	<p>Upaya Civil Disobedience Movement Dalam Demokratisasi di</p>	<p>Kualitatif-Deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa CDM muncul sebagai respons spontan dari</p>

	<p>Myanmar Pasca Kudeta Tahun 2021-2022</p> <p>Oleh Nurulhaq Devira</p> <p>Diterbitkan Tahun 2024</p>	<p>Pendekatan: Konsep Gerakan Sosial Baru (<i>New Social Movement</i>) dan Konsep Demokrasi</p>	<p>berbagai lapisan masyarakat Myanmar terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Gerakan ini melibatkan partisipasi luas dari berbagai kalangan. Aksi dilakukan berupa protes pada media sosial untuk menggalang dukungan internasional</p>
5	<p>Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021</p> <p>Oleh Willi Ashadi</p> <p>Diterbitkan Tahun 2022</p>	<p>Kualitatif</p> <p>Pendekatan: Teori Kudeta</p>	<p>Kudeta dilakukan dengan dukungan militer dan penangkapan pemimpin NLD, serta penegakan keadaan darurat. Militer mengklaim pemilu 2020 tidak sah dan melakukan tindakan represif terhadap demonstran.</p>
6	<p>Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern</p> <p>Oleh Faustina Isvana S.D.J, Euneke Dewi T, Fiki Rahmatina N</p> <p>Diterbitkan Tahun 2021</p>	<p>Kualitatif</p> <p>Pendekatan: Konsep Demokrasi dan Demokratisasi</p>	<p>Kudeta militer pada 2021 menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan demokrasi, kekuatan militer tetap dominan dan mengancam stabilitas politik.</p>
7	<p>Peranan Aung San Suu Kyi Dalam Masa Transisi Politik Di Myanmar Periode: 1990- 2000</p> <p>Oleh Farida Choirunisa</p> <p>Diterbitkan Tahun 2015</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Aung San Suu Kyi berperan penting dalam mendorong demokratisasi, tetapi terhalang oleh konstitusi yang tidak mendukung dan kudeta militer.</p>
8	<p>Analisis Kudeta Militer Myanmar dari Perspektif</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Kudeta dianggap sebagai pelanggaran</p>

	Hukum Pidana Internasional  Oleh Kadek Putra Yasa  Diterbitkan Tahun 2022		serius terhadap hak asasi manusia, dan hukum internasional tidak memberikan intervensi yang efektif.
9	Hubungan Sipil dan Militer Melalui Dinamika Kudeta Militer di Thailand  Oleh Faustina Ivana S.D.J, Euneke Dewi T, Fiki Rahmatina N  Diterbitkan 2023	Kualitatif	Militer sering kali berperan sebagai pelindung negara, tetapi juga melakukan intervensi dalam urusan sipil. Kudeta militer di Thailand menunjukkan ketidakstabilan politik dan dominasi militer yang berkelanjutan.
10	Rezim Militer dan Otoriter di Mesir, Suriah, dan Libya  Oleh Mohammand Riza Widyarsa  Diterbitkan Tahun 2012	Kualitatif	Rezim militer berhasil bertahan dengan menggunakan kekuatan militer, jaringan komunikasi, dan dukungan dari kekuatan asing, meskipun menghadapi oposisi yang signifikan.

### 1.5 Landasan Konseptual

#### Authoritarian Resilience

Dalam bukunya *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*, Larry Diamond mengemukakan konsep *authoritarian resilience* atau ketahanan otoriter, yang merujuk pada kemampuan rezim otoriter untuk bertahan dan beradaptasi di tengah berbagai tantangan dan tekanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Diamond menjelaskan bahwa meskipun banyak negara telah mengalami transisi menuju

demokrasi, sejumlah rezim otoriter tetap mampu mempertahankan kekuasaan mereka dengan menggunakan berbagai strategi yang efektif.

Salah satu aspek utama dari ketahanan otoriter adalah penggunaan represi terhadap oposisi. Rezim-rezim ini sering kali mengandalkan kekuatan militer dan aparat keamanan untuk menekan kritik dan membungkam suara-suara yang menentang mereka. Selain itu, mereka juga melakukan kooptasi, yaitu mengintegrasikan elemen-elemen oposisi ke dalam sistem untuk mengurangi ancaman terhadap kekuasaan mereka. Dengan cara ini, rezim dapat menciptakan ilusi partisipasi politik tanpa benar-benar memberikan kekuasaan kepada oposisi.

Diamond juga menyoroti pentingnya legitimasi dalam mempertahankan kekuasaan. Rezim otoriter sering kali membangun narasi yang menekankan stabilitas dan keamanan sebagai alasan untuk menolak reformasi demokratis. Mereka berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kekuasaan mereka diperlukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan. Selain itu, kontrol terhadap informasi dan media juga menjadi strategi penting, di mana rezim berusaha membatasi akses publik terhadap informasi yang dapat memicu perlawanan atau kritik.

Secara keseluruhan, konsep authoritarian resilience yang diuraikan oleh Diamond memberikan wawasan tentang bagaimana rezim otoriter dapat bertahan dalam menghadapi tantangan, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan politik. Ini menjadi penting dalam memahami dinamika kekuasaan di berbagai negara, termasuk dalam konteks negara-negara

yang sedang berjuang untuk mencapai demokrasi. Berikut adalah poin-poin utama dari konsep tersebut<sup>20</sup>:

1. **Repression (Represi)**: Salah satu strategi utama yang digunakan oleh rezim otoriter adalah represi terhadap oposisi. Diamond menunjukkan bahwa rezim ini sering kali mengandalkan kekuatan militer dan aparat keamanan untuk menekan kritik dan membungkam suara-suara yang menentang mereka. Tindakan ini mencakup penangkapan, intimidasi, dan kekerasan terhadap aktivis dan kelompok oposisi.<sup>21</sup>
2. **Co-optation (Kooptasi)**: Rezim otoriter juga menggunakan strategi kooptasi, di mana mereka mengintegrasikan elemen-elemen oposisi ke dalam sistem untuk mengurangi ancaman terhadap kekuasaan mereka. Dengan cara ini, rezim menciptakan ilusi partisipasi politik tanpa benar-benar memberikan kekuasaan kepada oposisi, sehingga mengurangi potensi perlawanan.<sup>22</sup>
3. **Legitimacy (Legitimasi)**: Diamond menekankan pentingnya legitimasi dalam mempertahankan kekuasaan. Rezim otoriter sering kali membangun narasi yang menekankan stabilitas dan keamanan sebagai alasan untuk menolak reformasi demokratis. Mereka berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kekuasaan mereka diperlukan untuk menjaga ketertiban dan

---

<sup>20</sup> Larry D, 2011, *The Spirit of Democracy: THE STRUGGLE TO BUILD FREE SOCIETIES THROUGHOUT THE WORLD*, New York: Times Book, hal. 56-59

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 56

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 56

mencegah kekacauan, sehingga menciptakan dukungan publik yang diperlukan untuk bertahan.<sup>23</sup>

4. ***Control of Information (Kontrol Informasi)***: Kontrol terhadap media dan informasi juga menjadi strategi penting bagi rezim otoriter. Dengan membatasi akses publik terhadap informasi yang dapat memicu perlawanan atau kritik, rezim dapat mengendalikan narasi yang berkembang di masyarakat dan mengurangi potensi mobilisasi oposisi.<sup>24</sup>
5. ***Adaptability (Kemampuan Beradaptasi)***: Diamond mencatat bahwa rezim otoriter menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan politik. Mereka dapat mengubah strategi dan taktik mereka sesuai dengan situasi yang dihadapi, sehingga tetap relevan dan mampu mempertahankan kekuasaan.<sup>25</sup>

Secara keseluruhan, konsep authoritarian resilience yang diuraikan oleh Diamond memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana rezim otoriter dapat bertahan dalam menghadapi tantangan, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan politik. Ini menjadi penting dalam memahami dinamika kekuasaan di berbagai negara, termasuk dalam konteks negara-negara yang sedang berjuang untuk mencapai demokrasi. Diamond menekankan bahwa untuk mempromosikan demokrasi secara efektif, penting untuk memahami dan mengatasi strategi-strategi yang digunakan oleh rezim otoriter ini. Dengan demikian, konsep authoritarian resilience mencakup berbagai aspek yang saling

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 57

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 57

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal 57

terkait, dari strategi domestik hingga faktor internasional, yang semuanya berkontribusi pada kemampuan rezim otoriter untuk bertahan dalam menghadapi tantangan. Dalam konteks ini, penting juga untuk mempertimbangkan peran masyarakat sipil. Meskipun rezim otoriter berusaha membungkam suara-suara kritis, masyarakat sipil yang kuat dapat menjadi kekuatan penyeimbang. Organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan gerakan sosial sering kali berfungsi sebagai saluran untuk menyuarakan ketidakpuasan dan mendorong perubahan. Namun, rezim otoriter sering kali berusaha melemahkan masyarakat sipil melalui pembatasan hukum dan intimidasi.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Sudjana, dan Ibrahim<sup>26</sup>, penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat ini. Pada umumnya, penelitian yang bersifat deskriptif ini didukung dengan sejumlah fakta-fakta beserta dengan data-data yang mendukung proses penulisan penelitian. Singkatnya, penelitian ini berisi sekumpulan data dan fakta yang mendukung, yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian dijelaskan dengan runtut sesuai dengan kejadian sebenarnya.

---

<sup>26</sup> Nana Sudjana & Ibrahim. (2004). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Sinar Baru Algesindo. Hlm 64

## **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian deskriptif kualitatif kali ini secara tertulis menggunakan studi pustaka atau literature review sebagai strategi pengumpulan data. Tujuan dari studi pustaka dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai sumber informasi mengenai unsur-unsur yang dapat mendukung penulisan ini baik berupa artikel, jurnal, tesis, maupun tulisan lain dengan asumsi dan fakta terkini.

## **1.6.3 Teknik Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif pada umumnya bersifat induktif dan berkelanjutan, metode ini nantinya menghasilkan pengertian, konsep, dan dilakukan setelah proses pengumpulan data dilakukan secara tuntas.<sup>27</sup> Metode kualitatif ini cenderung menggunakan pendekatan logika dan data-data yang dikelola pada akhirnya akan menjadi kesimpulan-kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, di mana pengumpulan data berbasis pada berbagai sumber seperti, jurnal, buku, skripsi, media massa, dan berbagai sumber yang nantinya akan dikelompokkan dan di analisa sesuai dengan kebutuhan pada artikel ini.

---

<sup>27</sup> Kurniasih, D., Rusfiana, Y., Agus, S., & Nuradhawat, R. (2021). Teknik Analisa. Alfabeta Bandung.

## **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.4.1 Batasan Waktu**

Batasan waktu untuk penelitian ini dimulai pada tahun 2021 ketika pertama kalinya Myanmar mengalami kudeta oleh junta militer pertama kalinya setelah revolusi tahun 1988 dan peralihan rezim, hingga tahun 2025 untuk mengetahui bagaimana rezim junta militer mempertahankan kekuasaan mereka dari awal kudeta pada 2021 hingga sekarang.

### **1.6.4.2 Batasan Materi**

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan pada konsep demokrasi untuk membantu dalam memahami dan menjelaskan mengenai dinamika ketika menjalankan kembali proses demokrasi yang terjadi di Myanmar. Materi yang dibahas dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada dinamika yang terjadi ketika menggulingkan rezim otoriter dan transisi sistem pemerintahan yang demokrasi. Kemudian, akan menjadi unit penjelas yaitu perkembangan kehidupan demokrasi pasca kudeta militer negara Myanmar.

## **1.7 Argumentasi Dasar**

Ketahanan rezim otoriter junta militer di Myanmar pasca kudeta tahun 2021 dapat dianalisis melalui pendekatan *authoritarian resilience* yang dikembangkan oleh Larry Diamond. Konsep ini menyoroti kemampuan rezim otoriter untuk beradaptasi, bertahan, bahkan mengkonsolidasikan kekuasaan di tengah tekanan domestik maupun internasional. Dalam konteks Myanmar, pasca penggulingan

pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, junta militer menunjukkan kapasitas untuk mempertahankan kekuasaan melalui berbagai mekanisme, dengan cara pendekatan represi pada oposisi dan masyarakat sipil. Melakukan kooptasi dengan birokrat pro rezim, korporasi rekanan tatmadaw, kelompok-kelompok keagamaan buddha dengan aliran nasionalis pro rezim, dan membuat kesepakatan dengan kelompok-kelompok perlawanan.

Junta juga berupaya mempertahankan legitimasi dengan berbagai cara dengan melakukan kudeta secara terang-terangan menuduh kecurangan terhadap pemerintahan sipil dan partai politik pro demokrasi dengan pembelaan sesuai undang-undang 2008 yang dibuat sendiri oleh Tatmadaw, kembali digunakannya ideologi bamar ultransioanlis era Ne Win yang menciptakan bahwa militer merupakan satu-satunya pelindung konstitusi negara yang mengontrol ketat minoritas dan oposisi politik,

Diamond dalam konsep *authoritarian resilience* menekankan bahwa rezim otoriter yang tahan lama cenderung memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi strategis terhadap tantangan yang muncul. Pihak Junta Myanmar meskipun menghadapi gelombang protes besar, sanksi internasional, dan tekanan diplomatik, berhasil menunjukkan kapasitas semacam ini, misalnya dengan membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC) sebagai entitas pemerintahan sementara untuk menyamarkan karakter kudeta militer, serta menyusun ulang sistem hukum untuk menjustifikasi penahanan terhadap oposisi. Dengan demikian, pendekatan *authoritarian resilience* tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami bagaimana rezim junta militer

Myanmar dapat bertahan dalam situasi krisis pasca kudeta, serta bagaimana mereka memodifikasi bentuk-bentuk kontrol untuk mempertahankan otoritasnya dalam jangka menengah hingga panjang.

## 1.8 Sistematika Penulisan

**Tabel 1.2 Sistematika Penulisan**

<b>BAB</b>	<b>ISI</b>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I PENDAHULUAN</b></p>	<p>1.1 Latar Belakang                      1.2 Rumusan Masalah                      1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan                          1.3.1 Tujuan Penulisan                          1.3.2 Manfaat Penelitian                              1.3.2.1 Manfaat Akademis                              1.3.2.2 Manfaat Praktis                      1.4 Penelitian Terdahulu                      1.5 Landasan Konseptual                      1.6 Metode Penelitian                          1.6.1 Jenis Penelitian                          1.6.2 Teknik Pengumpulan Data                          1.6.3 Teknik Analisa Data                          1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian                              1.6.4.1 Batasan Waktu                              1.6.4.2 Batasan Materi                      1.7 Argumentasi Dasar                      1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB II SEJARAH MYANMAR HINGGA DIBAWAH KEKUASAAN MILITER</b></p>	<p>2.1 Sejarah Kudeta Militer Myanmar                          2.1.1 Revolusi 8888                          2.1.2 Peralihan Rezim Pasca Revolusi                          2.1.3 Titik Awal Kudeta Militer Tahun 2021                      2.2 Profil Rezim Junta Dari Masa Ke Masa Dan Hubungannya Dengan Masyarakat Sipil                          2.2.1 Profil Rezim Junta Militer Tiap Masa</p>

	2.2.2 Dinamika Hubungan Pada Era Transisi Demokrasi Terbatas 2.3 Dampak Kudeta Terhadap Ekonomi dan Sosial 2.3.1 Dampak Kudeta Terhadap Kondisi Sosial 2.3.2 Dampak Pada Sektor Ekonomi
<b>BAB III KETAHANAN REZIM JUNTA MILITER PASCA KUDETA</b>	3.1 Represi 3.2 Kooptasi 3.3 Legitimasi 3.4 Kontrol Informasi 3.5 Kemampuan Beradaptasi
<b>BAB IV PENUTUP</b>	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

